



Bentuk TPF usai Bertemu OJK DIJ

Fraksi PDIP terkait
Kredit Fiktif Bank Jogja

JOGJA, Radar Jogja - Tak ingin ada kesimpangsiuran informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat, Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja memutuskan membentuk tim pencari fakta (TPF) terkait kasus kredit fiktif Bank Jogja. Hal

itu dilakukan setelah bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIJ. Koordinator TPF Kredit Fiktif Bank Jogja Susanto Dwi Antoro menyebut, Komisi B DPRD Kota Jogja bersama direksi Bank Jogja serta Bagian Perencanaan dan Kerjasama Setda Kota Jogja sudah beraudiensi ke OJK DIJ belum lama ini.

▶ Baca Bentuk... Hal 3



Bentuk TPF usai Bertemu OJK DIJ

Sambungan dari hal 1

"Hasilnya, Bank Jogja masih aman dan dinyatakan sehat, karena cadangan masih menutupi," ujarnya kemarin (25/4).

Dalam audiensi itu, OJK DIJ juga menyatakan Bank Jogja masih meraup keuntungan hingga Rp 20 miliar pada 2020. Dan hingga Maret 2021 lalu, keuntungan disebut mencapai Rp 5 miliar.

OJK juga menyebut proses pencairan kredit Bank Jogja kepada PTPT Indonusa Telemedia (Transvision). Pada 25 Maret lalu, Kejati DIJ secara resmi menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kredit fiktif sebesar Rp 27,4 miliar di Bank Jogja.

Meskipun begitu, pria yang akrab disapa Toro ini menyebut, Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja masih

mempertanyakan terjadinya kredit fiktif di Bank Jogja atau yang diperbankan disebut gagal tagih. Menurutnya, sebagai BUMD Pemkot Jogja, uang yang disimpan di Bank Jogja juga merupakan uang rakyat. "Kenapa bisa terjadi gagal tagih, itu masih kami pertanyakan, karena Rp 27,4 miliar itu juga uang warga Kota Jogja," ungkapnya.

Karena itu, setelah pertemuan dengan OJK, Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja sepakat membentuk TPF. Tugasnya melakukan investigasi kinerja penyaluran kredit di Bank Jogja hingga sampai dinyatakan gagal tagih. Dari temuan awal, dengan mengundang direksi, diketahui kredit yang dikucurkan sebesar Rp 28 miliar.

Selain itu, juga akan mengumpulkan bukti dari bagian analisa kredit Bank Jogja. Karena

diketahui dari 167 karyawan yang tercatat mengajukan kredit, hanya lima yang karyawan tetap PT Transvision. Kelazimannya, dalam pengucuran kredit harus melakukan survei ketat hingga ke keluarga. "Apakah itu dilaksanakan atau ada malsistem," tuturnya.

Tak cukup di situ, Toro sebagai ketua Komisi B akan mengundang jajaran komisaris hingga dewan pengawas Bank Jogja. Di antaranya mempertanyakan kinerja mereka.

"Termasuk kemungkinan memanggil pihak PT Transvision," jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja GM Dedy Jati Setiawan menambahkan, pihaknya kini juga mulai menginisiasi pembentukan panitia khusus (Pansus) pengawasan Bank Jogja. Hal itu dilakukan setelah menerima hasil

kinerja TPF.

"Yang kami lakukan juga untuk menjaga kepercayaan pada Bank Jogja, apalagi sempat ada isu *rush money*," ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK DIJ Parjiman ketika dikonfirmasi mengukui secara umum kondisi bank Jogja masih baik. Dia mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Salah satunya rentabilitas atau kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurutnya, dengan adanya kasus di Bank Jogja, rentabilitas akan terpengaruh karena bank wajib membentuk cadangan. "Cuma labanya jadi berkurang sebanyak cadangan yang harus dibentuk," jelasnya melalui aplikasi WhatsApp.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan,

kasus yang menimpa Bank Jogja merupakan penipuan terhadap bank, bukan kredit fiktif. Sebab, jika kredit fiktif kasusnya adalah

kredit tidak ada namun diakui ada. Tetapi, dalam kasus ini kreditnya ada.

"Nomenklatur kredit fiktif itu

tidak benar. Kreditnya ini ada kok. Cuma ditipu orang, jadi *clear* itu penipuan terhadap bank," katanya, 5 April lalu. (pra/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bank Jogja			

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005